

STRATEGI PENERAPAN SISTEM APLIKASI KEUANGAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI PADA BIRO LOGISTIK KEUANGAN POLDA SULAWESI SELATAN

Strategy for Implementing a Financial Application System in Improving Employee Performance at the Financial Logistics Bureau of Polda Sulawesi Selatan.

Asny Amir^{1*}, Nurmadhani Fitri Suyuthi², Abdul Samad Arif³

^{1,2,3}Fakultas Pascasarjana, Universitas Fajar.

*Email: asnykoe@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penerapan sistem aplikasi keuangan dalam meningkatkan kinerja pegawai serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas penerapannya pada Biro Logistik Keuangan Polda Sulawesi Selatan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penerapan sistem aplikasi keuangan dilaksanakan melalui empat tahapan utama, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan dan evaluasi. Strategi tersebut dijalankan melalui identifikasi kebutuhan, sosialisasi kebijakan, pelatihan teknis, pendampingan operasional, dan monitoring berkala. Penerapan strategi ini berkontribusi pada peningkatan efisiensi kerja, ketepatan waktu pelaporan, akurasi data, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Faktor pendukung efektivitas penerapan sistem meliputi komitmen pimpinan, kompetensi digital pegawai, ketersediaan infrastruktur teknologi, serta kejelasan regulasi internal. Faktor penghambat yang masih ditemukan meliputi gangguan jaringan, perbedaan kemampuan adaptasi digital antarpegawai, dan kebutuhan pelatihan lanjutan yang lebih terstruktur. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi implementasi yang terencana, disertai penguatan kapasitas sumber daya manusia dan dukungan organisasi, menjadi kunci keberhasilan penerapan sistem aplikasi keuangan dalam meningkatkan kinerja pegawai pada Biro Logistik Keuangan Polda Sulawesi Selatan.

Kata kunci: strategi implementasi, sistem aplikasi keuangan, kinerja pegawai, digitalisasi keuangan, sektor publik.

Abstract

This study aims to analyze the strategy for implementing a financial application system in improving employee performance and to identify the supporting and inhibiting factors affecting its effectiveness at the Financial Logistics Bureau of Polda Sulawesi Selatan. This study employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation, and were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings show that the implementation strategy of the financial application system was carried out through four main stages: planning, organizing, implementation, and supervision-evaluation. The strategy was operationalized through needs identification, policy socialization, technical training, operational assistance, and periodic monitoring. This strategy contributed to better work efficiency, timeliness of reporting, data accuracy, and stronger transparency and accountability in financial management. The supporting factors include leadership commitment, employees' digital competence, adequate technological infrastructure, and clear internal regulations. The inhibiting factors include network disruptions, unequal digital adaptation among employees, and the need for more structured follow-up training. This study concludes that a well-planned implementation strategy, supported by human resource capacity building and organizational commitment, is the key to the successful adoption of financial application systems in improving employee performance at the Financial Logistics Bureau of Polda Sulawesi Selatan.

Keywords: *implementation strategy, financial application system, employee performance, financial digitalization, public sector*

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah bergeser dari sekadar opsi modernisasi perangkat kerja menjadi sebuah urgensi paradigmatis dalam reformasi birokrasi sektor publik di Indonesia. Akselerasi teknologi informasi menuntut instansi pemerintah untuk meninggalkan pola tata kelola konvensional dan beralih ke Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) demi mewujudkan asas efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta kecepatan akses informasi (Kurniawan, 2023). Dalam domain sektor publik, pengelolaan keuangan negara menempati posisi paling krusial sekaligus rentan. Praktik pencatatan dan pelaporan keuangan manual sering kali dihadapkan pada keterbatasan sistemis, seperti risiko *human error*, keterlambatan diseminasi laporan, duplikasi data, serta lemahnya sistem pengendalian internal. Oleh karena itu, digitalisasi melalui integrasi sistem aplikasi keuangan berbasis teknologi informasi menjadi instrumen strategis untuk mengeskalasi kualitas tata kelola anggaran yang tertib, terkontrol, dan selaras dengan prinsip *good governance*.

Sebagai salah satu pilar institusi negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengemban tanggung jawab strategis tidak hanya dalam pemeliharaan keamanan dan penegakan hukum, melainkan juga dalam pengelolaan alokasi anggaran negara yang bernilai signifikan. Besarnya volume anggaran operasional, pembinaan sumber daya manusia, dan pengadaan sarana-prasarana menuntut Polri untuk menerapkan administrasi keuangan yang akuntabel dan yang

profesional. Dalam konteks reformasi birokrasi Polri, implementasi sistem informasi keuangan menjadi syarat mutlak untuk meminimalisasi potensi penyimpangan administratif sekaligus meningkatkan kepercayaan publik (*public trust*) terhadap institusi. Pada tingkat kewilayahan, Biro Logistik Keuangan Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan berperan sebagai garda terdepan yang mengorkestrasi perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan internal secara administratif dan substantif.

Namun demikian, dinamika empiris menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) antara harapan normatif teknologi dengan realitas implementasi di lapangan. Berdasarkan hasil observasi awal pada Biro Logistik Keuangan Polda Sulawesi Selatan, ditemukan sejumlah anomali utama yang saling berkelindan dalam menghambat optimalisasi sistem aplikasi keuangan. Fenomena pertama berkaitan dengan disparitas kesiapan dan kompetensi digital (*digital divide*), di mana terdapat kesenjangan adaptasi yang lebar antara pegawai berlatar belakang teknologi informasi dengan pegawai yang terbiasa dengan metode konvensional, sehingga memicu variasi kecepatan kerja dan meningkatkan risiko kesalahan penginputan data. Kondisi ini diperparah oleh fenomena kedua, yaitu praktik kerja ganda (*dual-system practice*) yang muncul akibat adanya ketidakpercayaan (*mistrust*) terhadap stabilitas sistem digital; pegawai cenderung melakukan pencatatan manual secara paralel sebagai bentuk mitigasi risiko pribadi yang justru menimbulkan redundansi data dan kontraproduktif terhadap esensi efisiensi. Selain faktor sumber daya manusia, kendala ketiga terletak pada kerentanan infrastruktur teknis seperti ketidakstabilan jaringan internet, keterbatasan kapasitas server, serta pembaruan (*update*) sistem yang mendadak tanpa sosialisasi memadai yang kerap menginterupsi kelancaran pelaporan secara *real-time*. Terakhir, keterbatasan pelatihan terstruktur membuat mayoritas transfer pengetahuan masih mengandalkan mekanisme informal (*peer learning*), sehingga standarisasi pemahaman operasional aplikasi sulit tercapai secara merata. Kondisi-kondisi tersebut menegaskan bahwa keberhasilan implementasi teknologi di sektor publik bukan sekadar persoalan teknis mekanistik, melainkan sebuah tantangan strategis multidimensional yang melibatkan aspek kepemimpinan, budaya organisasi, komunikasi internal, dan manajemen perubahan (*change management*).

Dalam perspektif manajemen strategis, kajian mengenai digitalisasi sistem keuangan pemerintah telah banyak didiskusikan oleh para peneliti terdahulu dalam lima tahun terakhir. Rachmawati (2021) menggarisbawahi bahwa efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sangat bergantung pada komitmen kepemimpinan dan kesiapan SDM demi mereduksi resistensi perubahan. Selaras dengan hal tersebut, Prasetyo dan Nugroho (2022) dalam studinya tentang aplikasi SAKTI menekankan pentingnya komunikasi internal yang intensif dan supervisi pimpinan. Dari sudut pandang sosiologi organisasi, Amalia (2023) menemukan bahwa organisasi dengan budaya adaptif jauh lebih sukses mengadopsi teknologi dibanding organisasi dengan birokrasi kaku. Lebih lanjut, Firmansyah (2024) serta Hidayat dan Sari (2025) mengonfirmasi bahwa kendala utama digitalisasi bukan terletak pada sistem aplikasinya, melainkan pada rendahnya kompetensi pengguna, minimnya evaluasi periodik, dan ketiadaan *monitoring* pasca-implementasi.

Meskipun literatur terdahulu telah memetakan berbagai faktor keberhasilan teknologi, mayoritas studi mengambil lokus pada kementerian sipil atau pemerintah daerah yang memiliki karakteristik budaya organisasi cenderung moderat. Sejauh ini, masih terdapat *scarcity* (kelangkaan) literatur yang secara spesifik menganalisis strategi penerapan aplikasi keuangan dalam ekosistem institusi kepolisian daerah yang memiliki karakteristik unik—seperti struktur hierarki komando yang ketat, kultur kerja militeristik yang disiplin namun rigid, serta pola komunikasi internal yang berbasis instruksi.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan akademis (*research gap*) tersebut melalui pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih guna mengeksplorasi secara mendalam, holistik, dan kontekstual mengenai persepsi, hambatan sosioteoretis, serta strategi adaptasi yang diterapkan oleh Biro Logistik Keuangan Polda Sulawesi Selatan. Melalui pemahaman yang mendalam mengenai faktor pendukung dan penghambat tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi perkembangan ilmu manajemen strategik sektor publik serta menyumbang rekomendasi pragmatis-konstruktif dalam mengakselerasi transformasi digital di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.

METODOLOGI

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin memahami secara mendalam strategi penerapan sistem aplikasi keuangan serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas implementasinya di lingkungan organisasi. Penelitian kualitatif menekankan pada upaya menggali makna, pengalaman, serta perspektif subjek penelitian terhadap suatu fenomena tertentu (Creswell, 2014). Dalam konteks ini, penerapan sistem aplikasi keuangan tidak hanya dipandang sebagai proses teknis administratif, tetapi sebagai fenomena organisasi yang melibatkan aspek kepemimpinan, budaya kerja, komunikasi internal, serta kesiapan sumber daya manusia. Lokasi penelitian dilaksanakan di Biro Logistik Keuangan Polda Sulawesi Selatan, yang merupakan salah satu biro di bawah struktur organisasi Polda Sulsel yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan logistik kepolisian.

Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui dua teknik utama, yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi lapangan. Kedua teknik tersebut digunakan untuk menggali informasi secara komprehensif mengenai strategi penerapan sistem aplikasi keuangan serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas implementasinya di lingkungan organisasi.

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait penerapan sistem aplikasi keuangan. 1. Kepala Biro Logistik Keuangan, 2. Kepala Subbag Keuangan, 3. Staf Operator Sistem, 4. Staf Monitoring dan Evaluasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan data empiris dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap tujuh informan kunci (terdiri dari pejabat struktural, staf operator sistem, dan tim monitoring-evaluasi), observasi lapangan, serta telaah dokumen di Biro Logistik Keuangan Polda Sulawesi Selatan. Temuan penelitian dikelompokkan ke dalam dua tema utama: strategi penerapan sistem aplikasi keuangan serta faktor pendukung dan penghambat efektivitasnya.

1. Strategi Penerapan Sistem Aplikasi Keuangan

Temuan lapangan menunjukkan bahwa strategi penerapan sistem aplikasi keuangan di Biro Logistik Keuangan Polda Sulawesi Selatan tidak diposisikan secara mekanistik sekadar mengganti perangkat kerja, melainkan sebagai bentuk transformasi tata kelola organisasi yang manajerial dan bertahap. Mengacu pada fungsi manajemen George R. Terry, strategi ini diimplementasikan secara sirkular melalui empat tahapan utama:

- a. Tahap Perencanaan (*Planning*). Langkah awal difokuskan pada identifikasi kelemahan sistem manual, pemetaan kebutuhan, dan penentuan arah kebijakan. Pimpinan menekankan pentingnya penyamaan persepsi bahwa digitalisasi adalah instrumen transparansi, bukan beban baru. Informan I-01 mengonfirmasi hal ini: "*Kami tidak langsung menerapkan sistem ini begitu saja... Kami tekankan kepada seluruh staf bahwa sistem ini... bagian dari reformasi manajemen keuangan agar lebih transparan dan terkontrol.*" (Wawancara, 15 Februari 2026).
- b. Tahap Pengorganisasian (*Organizing*). Struktur peran dibagi secara rigid antara pimpinan (otorisator), operator (inputer), dan tim monitoring. Kejelasan sekat fungsi ini meminimalisasi tumpang tindih kewenangan administrasi anggaran di internal biro.
- c. Tahap Pelaksanaan (*Actuating*). Strategi akselerasi dilakukan melalui pelatihan formal berulang dan pendampingan teknis berbasis simulasi penginputan data (Informan I-02, 17 Februari 2026). Menariknya, ditemukan mekanisme *peer learning* atau kerja kolaboratif informal, di mana operator yang lebih adaptif secara sukarela membimbing rekan kerja yang mengalami hambatan transisi digital (Informan I-03, 18 Februari 2026). Jika dibandingkan dengan *Technology Acceptance Model* (TAM) dari Davis (1989), pendekatan edukasi partisipatif ini terbukti berhasil meningkatkan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan persepsi kebermanfaatan (*perceived usefulness*), sehingga mereduksi resistensi internal pegawai terhadap teknologi baru.
- d. Tahap Pengawasan (*Controlling*). Guna menjamin akurasi, diterapkan mekanisme verifikasi berjenjang dan pengecekan silang (*cross-check*) bulanan antara data digital dengan dokumen fisik pendukung (Informan I-05, 22 Februari 2026). Observasi lapangan memperkuat bahwa transaksi harian telah diinput secara *real-time* sebelum finalisasi laporan.

Secara teoritis, keterpaduan keempat tahapan ini menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi sektor publik ditentukan oleh seberapa adaptif strategi organisasi dalam mengelola perubahan perilaku birokrasi, sejalan dengan premis manajemen strategik bahwa efektivitas sistem informasi berkorelasi langsung dengan disiplin tata kelola internal.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Penerapan Sistem

Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan sistem aplikasi keuangan di lokus penelitian dipengaruhi oleh interaksi dinamis antara faktor akselerator (pendukung) dan faktor kontributor hambatan (penghambat). Faktor pendukung utama bersumber dari adanya komitmen pimpinan yang kuat dan konsisten. Melalui instruksi tegas yang mewajibkan seluruh transaksi diproses melalui sistem serta melarang praktik pencatatan ganda (*dual-system*), pimpinan bertindak sebagai agen perubahan (*change agent*) yang secara struktural memaksa pembentukan budaya kerja digital yang disiplin (Informan I-01, 15 Februari 2026). Selain aspek kepemimpinan, kelancaran implementasi ini ditopang oleh kesiapan infrastruktur teknis berupa kecukupan unit komputer yang memadai untuk pengerjaan tugas secara paralel bagi masing-masing operator (Informan I-04, 21 Februari 2026). Kejelasan regulasi internal dan prosedur pelaporan yang tertata juga turut membangun kepastian kerja, sehingga staf pelaksana dapat beradaptasi secara tertib dengan sistem yang baru.

Namun demikian, efektivitas tersebut kerap terinterupsi oleh beberapa faktor penghambat, baik dari aspek teknis maupun sosiologis organisasi. Hambatan teknis klasik yang paling sering muncul adalah ketidakstabilan jaringan internet dan keterbatasan kapasitas server operasional, khususnya ketika terjadi sinkronisasi data secara massal saat mendekati batas waktu (*deadline*) pelaporan bulanan (Informan I-03, 20 Februari 2026). Sementara itu, hambatan sosiologis mewujud dalam bentuk kesenjangan kompetensi digital antarpegawai (*digital divide*). Pegawai senior atau yang terbiasa dengan pola kerja konvensional membutuhkan waktu transisi yang lebih lama dan cenderung menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada operator utama ketika menghadapi fitur koreksi data atau pembaruan sistem (Informan I-02, 19 Februari 2026).

Secara teoretis, fenomena ini menegaskan bahwa transformasi digital belum sepenuhnya selesai ketika aplikasi diluncurkan. Keberhasilan sistem sangat bergantung pada bagaimana organisasi mengelola keseimbangan sosioteknis (*socio-technical balance*). Oleh karena itu, efektivitas implementasi jangka panjang memerlukan mitigasi risiko teknis serta penyusunan program pelatihan formal lanjutan yang terstruktur guna pemeratakan literasi digital dan meminimalkan ketergantungan operasional pada individu tertentu (Informan I-07, 24 Februari 2026).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka dari itu peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi Penerapan Sistem Aplikasi Keuangan

Strategi penerapan sistem aplikasi keuangan di Biro Logistik Keuangan Polda Sulawesi Selatan dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pendampingan, serta pengawasan dan evaluasi. Strategi ini disusun berdasarkan kebutuhan organisasi dan dijalankan secara bertahap melalui sosialisasi kebijakan, pelatihan teknis, pendampingan operasional, dan monitoring berkala. Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi tersebut berkontribusi pada meningkatnya efisiensi kerja, ketepatan waktu pelaporan, akurasi data, dan ketertiban administrasi.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat

Strategi penerapan sistem aplikasi keuangan dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi komitmen pimpinan, kompetensi digital pegawai, ketersediaan infrastruktur teknologi, dan kejelasan regulasi internal. Faktor penghambat meliputi gangguan teknis, keterbatasan jaringan, serta perbedaan kemampuan adaptasi digital antar pegawai. Berdasarkan temuan penelitian, efektivitas sistem akan semakin kuat apabila organisasi secara konsisten memperkuat pelatihan, dukungan teknis, dan pengawasan penggunaan sistem.

DAFTAR PUSTAKA

1. Amalia, R. (2023). Digitalisasi sistem keuangan pada instansi publik di tingkat provinsi. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1), 55–70.
2. Ananda, R. (2022). Strategi implementasi aplikasi keuangan terpadu dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 88–99.
3. Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
4. Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.
5. Fadillah, A. (2023). Implementasi sistem aplikasi keuangan di lingkungan Polri dan tantangannya terhadap SDM. *Jurnal Kebijakan Publik dan Manajemen*, 11(1), 45–60.
6. Firmansyah, A. (2024). Implementasi sistem informasi keuangan berbasis elektronik pada lembaga pemerintah daerah. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 12(1), 77–92.
7. Herlina, S. (2021). Analisis efektivitas penerapan sistem aplikasi SAKTI terhadap kinerja ASN di Kementerian Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi*, 9(3), 134–147.
8. Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Beverly Hills: Sage Publications.
9. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publications.
10. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
11. Nurlina, D. (2022). Pengaruh e-government terhadap kinerja aparatur sipil negara di Kabupaten Gowa. *Jurnal Manajemen dan Pemerintahan*, 5(2), 56–68.
12. rasetyo, D., & Nugroho, A. (2022). Efektivitas sistem aplikasi keuangan tingkat instansi pada instansi vertikal pemerintah. *Jurnal Keuangan Negara*, 10(2), 101–115.
13. Rahmawati, L. (2022). Pengaruh implementasi sistem informasi keuangan daerah terhadap kinerja pegawai (Studi pada BPKAD Kota Makassar). *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Publik*, 7(1), 21–33.
14. Rizky, F. (2020). Dampak digitalisasi sistem keuangan terhadap produktivitas pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 8(2), 122–134.
15. Sari, M. (2021). Pengaruh kompetensi digital terhadap kinerja pegawai di era transformasi digital pemerintahan. *Jurnal Manajemen dan Teknologi*, 6(4), 78–91.
16. Simanjuntak, H. (2019). Implementasi sistem informasi akuntansi dalam meningkatkan kinerja karyawan pada BUMN sektor logistik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(3), 101–112.
17. Syamsuddin, I. (2021). Penerapan aplikasi keuangan SIMDA dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja aparatur. *Jurnal Reformasi Birokrasi*, 4(1), 67–80.
18. Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Los Angeles: Sage Publications.